

Anggota La Via Campesina dari 26 negara menghadiri Konferensi Internasional Hak Asasi Petani pada tanggal 21-24 Juni 2008 di Jakarta, membahas pemenuhan hak asasi petani.

3



DEKLARASI KONFERENSI INTERNASIONAL HAK ASASI PETANI

Jakarta, 21-24 Juni 2008

4

PENDAPAT

Industri agrofuel global cipatakan kemiskinan dan kelaparan.

6

EDISI 53. JULI 2008

Harga Rp. 2000,-

PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

KTT PANGAN DUNIA

Pidato Henry Saragih dalam sidang FAO

Konferensi tingkat tinggi yang diadakan saat ini sebenarnya dilaksanakan untuk merayakan kesuksesan para pemimpin negara dunia dalam menghapuskan kemiskinan dan kelaparan di dunia. Hal ini merujuk pada komitmen para pemimpin negara dalam *World Food Summit* ditahun 1996 untuk mengurangi kelaparan pada tahun 2015 menjadi sejumlah 50 persen dari angka kelaparan di tahun 1996.

Namun kenyataannya, saat ini dunia telah menyaksikan ribuan petani yang mati bunuh diri akibat mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Dunia juga telah menyaksikan kelaparan, anak-anak yang menderita gizi buruk, serta antrian panjang dibawah terik matahari dengan memegang kupon bantuan pangan. Bahkan di beberapa tempat, antrian ini seringkali berubah menjadi kericuhan.

Hal tersebut merupakan akibat dari kebijakan yang harus anda semua pertanggungjawabkan. Inilah akibat dari liberalisasi pangan dan liberalisasi pasar untuk produk pertanian. Kebijakan yang hanya memaksa petani untuk menanam tanaman yang akan diekspor dan sebaliknya telah memaksa pemerintahnya untuk melakukan impor pangan pokok. Mode Industri untuk pertanian telah menyebabkan pertanian berada dibawah control perusahaan agribisnis transnasional yang mendapatkan

Bersambung ke hal.2



Henry Saragih mewakili gerakan petani internasional La Via Campesina di depan KTT Pangan FAO, Roma (10/6)



KONFERENSI HAP

Telah terjadi pelanggaran massal terhadap hak asasi petani

JAKARTA. Lebih dari 1000 petani kecil anggota gerakan petani internasional La Via Campesina yang datang dari 25 negara dan 12 propinsi di Indonesia mengikuti konferensi internasional hak asasi petani (22/6). Konferensi tersebut berlangsung selama 5 hari dengan tujuan untuk menarik perhatian dunia atas nasib petani kecil.

Petani kecil merepresentasikan hampir separuh populasi dunia dan mereka adalah tulang punggung dari sistem pangan global. Namun, hak-hak mereka telah dilanggar secara sistematis.

Petani kecil terusir dari

tanah mereka untuk memberi tempat bagi perkebunan besar, infrastruktur dan industri, perumahan dan proyek komersial. Salah satu contoh, pada 29 Januari 2008, 35 orang petugas keamanan dari Perkebunan Nasional PTPN IV Adolina dengan dukungan dari 70 orang petugas polisi dari Kabupaten Deli Serdang menghancurkan 30 hektar tanah pertanian yang sudah ditanami jagung dan singkong milik petani kecil.

Tujuh orang petani ditangkap saat berusaha melindungi tanaman mereka (saat ini mereka sudah dilepaskan). Perusahaan membersihkan lahan tersebut

untuk ditanami kelapa sawit.

Special Rapporteur PBB untuk hak atas perumahan memperhitungkan bahwa rata-rata 71,6% rumah tangga pedesaan di Afrika, Amerika Latin dan Asia Barat dan Timur (kecuali Cina) tidak bertanah atau hampir tidak bertanah.

Lebih lanjut, petani perempuan menderita dari marjinalisasi ganda: sebagai petani dan sebagai perempuan. Sebagai petani mereka melakukan sebagian besar pekerjaan pertanian namun sebagai perempuan akses mereka atas tanah,

Bersambung ke hal. 2

Telah terjadi...

sumber daya, pendapatan dan pengambilan keputusan dibatasi.

Kebijakan perdagangan memaksa liberalisasi lebih lanjut atas pasar pangan. Sebagai akibatnya, barang-barang impor membanjiri pasar domestik.

Di Meksiko, kebijakan perdagangan bebas telah menyebabkan membanjirnya jagung impor murah dari Amerika Serikat. Petani lokal tidak mampu untuk berkompetisi terpaksa kehilangan sumber penghidupan mereka. Kenaikan harga bahan jagung saat ini di pasar dunia telah secara drastis meningkatkan jumlah orang lapar di Meksiko.

Sementara itu, petani kecil semakin menghilang di seluruh dunia. Di Turki, satu keluarga tani meninggalkan pertanian setiap 50 detik. Dua tahun lalu yang petani tidak mampu untuk membayar hutang-hutang

mereka pada bank mulai melakukan bunuh diri, situasi ini telah meningkat secara gratis.

Organisasi petani berjuang untuk membela hak-hak mereka-akses terhadap tanah, air dan benih, khususnya organisasi yang menuntut partisipasi yang lebih besar dalam kebijakan pertanian seringkali menjadi subjek kekerasan. Di Brasil, diperkirakan bahwa 4.340 keluarga telah terusir dari lahan mereka oleh perusahaan swasta.

Di tahun 2007, 28 orang terbunuh dan 259 orang menerima ancaman pembunuhan di lahan konflik. Pada bulan November 2007, Valmir Mota d'Oliveira (Keno), seorang pimpinan tani dari La Via Campesina Brasil terbunuh pada saat okupasi lahan oleh petugas keamanan yang dipekerjakan oleh Syngenta.

Di Indonesia sepanjang tahun 2007, lebih dari 196.179 hektas tanah pertanian tergusur secara paksa, lebih dari 166 orang

petani ditangkap dan mengalami kekerasan, 12 orang terluka dan 8 orang terbunuh dalam konflik agraria.

Petani dan aliansi mereka bertemu dalam konferensi internasional di Jakarta yang akan menyampaikan situasi di negara mereka dan membangun kekuatan untuk mendapat pengakuan dan penegakan hak-hak mereka.

La Via Campesina meminta PBB untuk menetapkan kerangka kerja hukum internasional untuk mengakui Hak Asasi Petani. La Via Campesina membutuhkan tanggung jawab dan komitmen masing-masing negara dan lembaga internasional untuk melaksanakan hak-hak asasi petani kecil, dengan mendukung pertanian keluarga berkelanjutan, pembaruan agraria dan mempromosikan pasar lokal.

Krisis pangan dan lingkungan saat ini merupakan hasil dari

kontrol rantai pangan dan pertanian yang sangat luas oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan liberalisasi pasar. Hal ini merusak lingkungan, menggantikan pertanian keluarga dengan perkebunan pertanian skala besar. Pangan saat ini berada di tangan para investor dan spekulan. Seluruh kebijakan telah meninggalkan jutaan petani tanpa pendapatan yang layak dan populasi dunia dalam krisis pangan global.

Saat ini pemerintah harus memecahkan krisis yang mereka ciptakan ketika mereka berpikir bahwa perdagangan bebas dapat mencukupi dan memberi makan dunia. Saatnya telah tiba untuk mengubah kebijakan pertanian menuju produksi pangan skala kecil, kedaulatan pangan dan pasar lokal. Pangan tidak hanya menjadi issue bagi petani, ini merupakan keprihatinan bersama seluruh umat manusia.

Pidato Henry...

keuntungan berlipat ganda pada saat krisis sekarang ini, sebagian mendapatkan untung hingga dua kali lipat dalam 3 bulan pertama. Hal ini telah menyalahi hak atas pangan rakyat juga telah menyalahi hak rakyat atas kehidupan.

Tahun 2002 dalam World Food Summit FAO, saya telah berdiri ditempat yang sama dihadapan anda sekalian, pada waktu itu, saya robek kertas yang saya pegang dan saya memakannya. Saya memakannya karena pada waktu itu kami tidak mempercayai Kebijakan FAO yang mengklaim akan mengurangi kelaparan. Saya memakan kertas tersebut karena kami tahu bahwa rakyat didunia hanya akan mendapatkan kertas saja tanpa mendapatkan kebijakan nyata yang mampu memberi makan mereka.

saya mewakili jutaan Buruh tani, petani tak bertani dan petani kecil anggota La Via Campesina diseluruh dunia di lebih dari 55 negara.

Saat ini, saya kembali berada disini, di gedung yang sama

dengan perwakilan negara-negara di dunia meminta hal yang sama dengan apa yang saya minta di tahun 2002. Kebijakan yang ada ditetapkan di tahun 2002 nyatanya telah gagal. Saat ini terdapat lebih banyak rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan dari pada tahun 2002. Kami tidak menginginkan kesalahan yang serupa terulang kembali.

Jalan keluar dari kami untuk menghadapi krisis pangan adalah untuk meletakkan penguasaan pangan ditangan para petani kecil: Seperti yang anda semua ketahui, petani kecil adalah mereka yang menghasilkan pangan namun sekaligus menjadi konsumen dari pangan. Kita tidak bisa membiarkan pangan jatuh ketangan perusahaan agribisnis: kita harus membiarkan petani memberi makan keluarganya sendiri, masyarakat kampunya dan untuk berproduksi untuk dijual di pasar domestiknya. Inilah yang dimaksud dengan kedaulatan pangan. Inilah yang saya minta.

Kami menginginkan supaya

FAO dan pemerintah tiap negara untuk membangun kembali ekonomi pangan nasionalnya, menyusun kebijakan nasional untuk melindungi dan mendukung petani kecil dan para produsen makanan kecil untuk pasar domestic. Anda semua harus menghentikan liberalisasi pasar produk pertanian dan mekanisme penghancura para petani penghasil pangan. Anda semua harus menghentikan produksi agrofuel yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan jutaan petani kecil jatuh miskin.

Anda semua harus menghentikan spekulasi pangan. Pangan sangat penting bagi kehidupan, pangan tidak boleh menjadi komoditas yang bisa dispekulasi untuk kepentingan pasar internasional.

Via Campesina telah berjuang untuk pembaruan agrarian dan land reform. FAO harus melanjutkan komitmen yang telah dibuat di tahun 2006 dalam at the Konferensi internasional pembaruan agraria dan

pembangunan pedesaan ICARRD. FAO juga telah mendorong pengelolaan hama terintegrasi yang tidak membuat petani tergantung pada produk kimia yang diproduksi oleh perusahaan agribisnis.

Sistem Pertanian berkelanjutan oleh petani adalah jawaban dari krisis iklim. Ini adalah model pertanian yang efisien yang tidak memerlukan bahan bakar dan energi seperti yang dilakukan oleh model pertanian Industri. Pertanian berkelanjutan akan mendinginkan dunia.

Kita seharusnya malu dan dipenuhi ras bersalah karena kita tidak mampu mengurangi angka kelaparan, alih-alih menurunkan angka kelaparan, kita justru meningkatkan angka kelaparan. Oleh karenanya kita harus mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Anda semua harus mengakui kesalahan anda. Bukti-buktinya terlihat pada perut kosong jutaan rakyat didunia.



Penanggung Jawab: Henry Saragih **Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad **Pemimpin Redaksi:** Cecep Risnandar;
Dewan Redaksi: Achmad Ya'kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani; **Redaktur:** Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahrani;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moa (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI)

Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email:

KONFERENSI HAP

Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi petani

Kami, anggota La Via Campesina yang berasal dari 26 negara menghadiri Konferensi Internasional Hak Asasi Petani pada tanggal 20-24 Juni 2008 di Jakarta. Setelah berbagi pengalaman dan diskusi mendalam secara substantif mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi petani, kami yakin bahwa saatnya nanti semua hal itu akan terpenuhi. Menyelamatkan petani sama artinya menyelamatkan kelangsungan hidup di dunia ini.

Kami menyadari bahwa hingga kini pengusiran yang disertai kekerasan dari lahan pertanian terus saja terjadi. Mega proyek seperti perkebunan untuk agro-fuels, pembangunan infrastruktur, ekspansi industri, industri ekstraktif dan tourisme, serta atas nama program penyelamatan lingkungan dan hutan telah menyebabkan hancurnya komunitas dan kehidupan petani.

Perampasan lahan dan pengrusakan tanaman pangan seringkali digunakan sebagai cara untuk mengambil alih sumber alam yang telah dikuasai dan menghidupi kaum tani secara turun menurun. Selanjutnya, tindak kekerasan adalah pengalaman yang seringkali petani hadapi. Kekerasan bisa secara fisik atau mental dan bahkan mengancam kehidupan. Karena mereka berjuang untuk

memenuhi hak asasi petani.

Berdasarkan laporan yang telah diterima dari delegasi Indonesia anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) dan serta dianalisa secara mendalam oleh peserta konferensi. Apa yang telah dialami petani di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan akan makanan dan kehidupan keluarga mendapat ancaman yang berat. Seperti di Desa

Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Jawa Tengah yang sejak bulan Mei 2008 lalu mengalami tindakan teror, ancaman penangkapan oleh kepolisian, serta pengrusakan tanaman padi dan melati. Di Wonosobo, petani-petani mendapat tekanan dari Perum Perhutani untuk segera keluar dari areal yang dianggap kawasan milik mereka. Di Kulonprogo, Yogyakarta pertanian di areal yang mulanya tandus, berkat kegigihan petani menjadi lahan berpasir yang subur saat ini terancam akibat proyek penambangan pasir dengan investasi asing. Di Jambi petani di Merangin (hitam ulu) sedang berkonflik dengan perusahaan perkebunan sawit, PT. Sari Aditya Loka (SAL). Demikian juga yang sedang dialami seluruh petani di penjuru Indonesia yang belum terpenuhinya hak dasar petani mulai dari tanah, bibit, alat dan mesin pertanian, sarana

produksi padi, serta kepastian harga dan nilai hasil panen.

Menurut pandangan petani peserta konferensi proyek atau aktifitas yang disebut diatas bila tidak dihentikan akan mengancam kehidupan, tidak hanya petani dan keluarganya, namun kerusakan lingkungan, menurunnya produksi makanan di wilayah, serta akan semakin banyak warga negara Indonesia yang terjebak dalam kemiskinan dan kekurangan gizi-malnutrisi.

Hal ini sungguh bertentangan dengan deklarasi hak asasi petani bagian I tentang hak atas kehidupan yang layak, antara lain mengenai petani baik perempuan maupun laki-laki dan keluarganya berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman dan hal lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan dirinya. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat.

Demikian juga pelanggaran pada bagian II tentang hak petani atas sumber-sumber agraria. Hak-hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tanpa membedakan jenis, umur atau senioritas berdasarkan

hukum dan praktek adat dan kebiasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran

Dan Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap dan/atau memiliki tanah negara (non produktif) yang sudah menjadi sumber pokok kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat

Oleh karena itu, kami peserta konferensi internasional Hak Asasi Petani, menyerukan dan mendesak kepada Pemerintah, DPR, Perum Perhutani serta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera secara aktif menghentikan berbagai tindakan dan kebijakan yang melanggar hak asasi petani yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian menyelesaikan persoalan ini dengan berpihak kepada petani dan buruh tani, sebagai salah satu kelompok rentan.

Kami juga menyerukan, bahwa dalam kondisi krisis pangan dan energi sekarang ini yang disebabkan oleh kebijakan neoliberal-kapitalis, kami menyerukan kepada pemerintah, parlemen dan berbagai pihak untuk segera memberikan perlindungan dan memenuhi hak konstitusi kaum tani di Indonesia.



KONFERENSI HAP

Deklarasi Konferensi Internasional Hak Asasi Petani

Menuju perayaan ke-60 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Petani Menuntut Konvensi Hak Asasi Petani

Kami, delegasi petani kecil, perempuan dan laki-laki, dari gerakan petani internasional La Via Campesina datang dari 26 negara untuk menghadiri Konferensi Internasional Hak Asasi Petani dari tanggal 20 - 24 Juni 2008 di Jakarta, Indonesia. Setelah melalui tujuh tahun proses diskusi mendalam mengenai substansi dan strategi, semangat kami membara dan penuh keyakinan untuk menuju sebuah Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai Hak Asasi Petani. Konvensi ini akan menjadi landasan dasar demi tercapainya kehidupan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia di planet ini.

Kami para petani, perempuan dan laki-laki, masyarakat tak bertanah, buruh tani, petani dan produsen kecil, masyarakat adat dan pemuda-pemudi tani, yang mewakili hampir separuh dari populasi dunia, dan merupakan tulang punggung sistem pangan. Krisis pangan menunjukkan adanya pelanggaran yang luas dan sistematis terhadap hak asasi petani.

Kami digusur dengan kekerasan dan dipaksa pindah dari tanah dan sumber-sumber penghidupan kami. Mega proyek pembangunan seperti banyaknya perkebunan berskala masif untuk agrofuel, bendungan-bendungan raksasa, proyek-proyek infrastruktur, perluasan industri, dan pariwisata menyebabkan hancurnya kehidupan kami. Semakin banyak konflik bersenjata dan peperangan yang terjadi di wilayah pedesaan, sehingga terjadi perampasan lahan dan penghancuran hasil panen yang seringkali digunakan sebagai senjata melawan penduduk pedesaan.

Kami tidak bisa mendapatkan pendapatan untuk hidup layak. Gabungan kekuatan kebijakan nasional dan persyaratan kerangka kerja internasional mendorong kami ke arah kepunahan. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut yang penting mendapat perhatian ialah proses privatisasi tanah, yang telah

mendorong ke arah konsentrasi kepemilikan lahan, layanan publik di pedesaan yang semakin berantakan, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung komersialisasi produksi pertanian oleh petani kecil dan menengah; dukungan kuat atas ekspor pertanian berbasis industri; dorongan terhadap liberalisasi perdagangan produksi pertanian dan kebijakan ketahanan pangan berbasis perdagangan internasional.

Di banyak negara, kami terus kehilangan benih-benih warisan leluhur dengan sangat cepat, pengetahuan pertanian lokal kami terus menghilang dan kami dipaksa untuk membeli benih

Di banyak negara, kami terus kehilangan benih-benih warisan leluhur dengan sangat cepat, pengetahuan pertanian lokal kami terus menghilang dan kami dipaksa untuk membeli benih yang dihasilkan oleh perusahaan transnasional demi keuntungan mereka semata.

yang dihasilkan oleh perusahaan transnasional demi keuntungan mereka semata. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan tanaman transgenik dan pertanian monokultur menyebabkan punahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati.

Lebih lanjut, petani perempuan menderita dari marjinalisasi ganda: sebagai petani dan sebagai perempuan. Tanggung jawab untuk memelihara keluarga berada di tangan kami, ketidak pastian dan minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak petani memaksa kami untuk bekerja lebih lama dengan upah rendah. Perempuan yang menjadi buruh tani dipaksa untuk menggunakan pupuk kimia dan mengalami resiko kesehatan tinggi.

Penindasan dengan kekerasan menjadi bagian dari keseharian kami. Ribuan pimpinan tani ditangkap tanpa pengadilan yang jelas, ditahan, diteror,

disiksa, dibunuh dan bahkan mengalami kriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya. Ribuan pimpinan tani dikriminalisasi akibat perjuangan atas hak-hak mereka. Kami petani perempuan menderita kekerasan di tangan suami, rekan dan majikan kami. Kekerasan yang dihadapi baik secara fisik atau mental dan bahkan mengancam keselamatan hidup kami.

Kami mewarisi sejarah panjang perjuangan kaum tani untuk membela hak-hak kami. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pakta-pakta utama hak asasi manusia merupakan instrumen penting dalam perjuangan kami. Namun

sebagai kelompok yang tertindas seperti masyarakat adat dan perempuan, kami memandang bahwa saatnya telah tiba untuk mengartikulasikan sepenuhnya hak-hak kami. Ini adalah saatnya untuk kedaulatan pangan. Terdapat jurang yang lebar antara pemahaman dan pelaksanaan pakta utama hak asasi manusia ketika diterapkan atas petani. Kami menghadapi berbagai pola pelanggaran terhadap hak asasi kami, seperti kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dan perdagangan bebas (FTA). Untuk menghadapi berbagai metode pelanggaran tersebut, kami membutuhkan kebijakan dan mekanisme khusus untuk menjamin perlindungan hak-hak kami secara penuh.

Konvensi Hak Asasi Petani yang akan dituju mencakup nilai-nilai hak asasi petani-dan harus secara khusus memperkuat hak-hak petani perempuan- yang harus dihormati, dilindungi dan

dipenuhi oleh negara dan lembaga internasional.

Untuk tujuan itulah, kami berkomitmen pada diri kami sendiri untuk menjalankan secara bersamaan strategi multi level pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk membangun kesadaran, menggerakkan dukungan dan membangun aliansi tidak saja dengan petani, tetapi juga pekerja pedesaan, penggembala, masyarakat adat, nelayan, kelompok lingkungan hidup, perempuan, pakar hukum, pembela hak asasi manusia, kaum muda, organisasi keagamaan, serta masyarakat urban dan organisasi konsumen.

Kami juga akan mencari dukungan pemerintah, parlemen, dan institusi hak asasi manusia untuk mengembangkan Konvensi Hak Asasi Petani. Kami menyerukan kepada FAO dan IFAD untuk menegakkan mandat mereka dengan berkontribusi dalam perlindungan hak asasi petani. Kami meminta perwakilan resmi FAO untuk mengkompilasikan seluruh instrumen FAO bagi perlindungan hak asasi petani sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Kami akan mengedepankan deklarasi hak asasi petani ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Di bawah ancaman kaum kapitalis neoliberal terhadap sistem pangan lokal dan kehidupan kaum tani, kami menyerukan kepada semua orang untuk menggalang kekuatan dan bersatu demi keselamatan umat manusia.

Kami menyerukan kepada anggota dan aliansi kami untuk mengadakan aksi bersama demi tercapainya Konvensi Hak Asasi Petani pada Peringatan ke 60 Deklarasi Hak Asasi Petani pada tanggal 10 Desember yang akan datang.

Globalkan Harapan,
Globalkan Perjuangan!!

Jakarta, 24 Juni 2008
La Via Campesina

Deklarasi Pertemuan Petani Perempuan untuk Hak Asasi Petani

Kami, petani perempuan dari Kolombia, Republik Domenika, Korea Selatan, Indonesia, Spanyol, Thailand, Malaysia dan Timor Leste, berkumpul di Jakarta dan membicarakan kondisi petani perempuan di seluruh.

Kondisi yang sulit di pedesaan dan tidak punya tanah memaksa perempuan untuk pergi ke perkotaan dan keluar negeri untuk menjadi buruh berupah rendah. Kemiskinan meluas di pedesaan dan perempuan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memberi makan keluarga, menyebabkan meningkatnya gizi buruk baik di perkotaan maupun pedesaan.

Tanggung jawab untuk merawat keluarga berada di tangan perempuan, kekurangan dan ketidak pastian pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak juga memaksa perempuan untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah rendah.

Perempuan yang bekerja di lading dan menggunakan pupuk kimia rentan terhadap penyakit. Penggunaan pupuk kimia mengancam baik tubuh manusia dan juga lingkungan, terutama saat digunakan oleh mereka yang buta huruf dan tidak mampu membaca instruksi serta tidak ada siapa pun yang dapat menerangkan cara penggunaan produk tersebut.

Perempuan juga menderita kekerasan yang dilakukan oleh suami, rekan atau pimpinan tempat kerja mereka. Kekerasan yang diderita bisa secara fisik atau mental dan bahkan mengancam keselamatan mereka.

Kebijakan pertanian global yang dipaksakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Dana Moneter Internasional (IMF), kini diperparah dengan krisis pangan, memaksa petani untuk berhutang bagi pertanian mereka yang pada akhirnya menyebabkan mereka terbelit hutang dan memaksa mereka meninggalkan tanah pertanian mereka. Banyak petani melakukan bunuh diri ketika mereka tidak mampu melunasi hutang-hutang mereka, di banyak kasus hutang memaksa laki-laki untuk meninggalkan wilayah pedesaan untuk mencari pekerjaan di perkotaan, meninggalkan perempuan sendirian memikul beban rumah tangga pertanian.

Lebih lanjut, di banyak konflik agrarian perempuan berjuang di garis terdepan dengan resiko membahayakan dirinya.

Kaum muda tidak lagi berkeinginan menjadi petani karena pekerjaan ini tidak diakui secara social dan tidak memiliki upah yang layak. Lebih lanjut, membeli lahan pertanian tidak lah murah akibat spekulasi

sebagai akibat dari pembangunan atau industrialisasi: perumahan, wilayah industri, kawasan perdagangan, dan infrastruktur yang mendorong meningkatnya harga tanah. Dalam situasi ini petani yang telah lama mengolah lahan tergusur ke wilayah yang kurang subur dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Di banyak Negara, petani tidak diperkenankan untuk menjaga, melestarikan, melakukan pertukaran dan menanam benih mereka sendiri, menyebabkan hilangnya pengetahuan local dalam pertanian dan petani diwajibkan untuk membeli benih yang dihasilkan oleh perusahaan transnasional yang hanya memikirkan keuntungan mereka semata. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan tanaman transgenic (GMO) dan tanaman sejenis (monokultur) yang menyebabkan hilangnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati secara umum.

Perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintah tanpa berkonsultasi dengan rakyat mendorong masuknya pangan impor yang mengancam kedaulatan pangan bangsa dan mengabaikan aspek makanan yang sehat dan aman. Seperti perdagangan bebas antara Korea dan Amerika Serikat, yang

diawali oleh perjanjian daging sapi impor dari Amerika Serikat. Perjanjian perdagangan bebas mempengaruhi Negara dan juga perempuan secara pribadi. Salah satu contoh, melalui perjanjian perdagangan bebas Indonesia akan mengimpor makanan laut ke Jepang sebagai pertukaran bagi ijin perawat-perawat Indoseia untuk bekerja di Jepang.

Melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan dalam keseharian kami sebagai petani; Pertemuan Perempuan Internasional untuk Hak Asasi Petani di Jakarta menuntut: Semua pelanggaran hak asasi petani yang terjadi dalam keseharian kita harus segera dihentikan.

Untuk menerapkan sebuah Konvensi Internasional Hak Asasi Petani sebagai perjuangan bagi pengakuan para petani, Konvensi ini agar menjadi sebuah instrument untuk menegakkan hak-hak para petani dan menjamin pemenuhannya oleh pemerintah.

Sangat lah penting agar konvensi ini mengakui secara formal peran para petani perempuan dalam pertanian. Petani perempuan harus mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.

Jakarta, 20 Juni 2008
La Via Campesina



Industri agrofuel ciptakan kelaparan

Gelombang investasi yang kini berlangsung untuk mendapatkan sumber energi baru melalui penanaman dan industri pengolahan dari jagung, kedelai, tebu, canola, dll tidak akan menyelesaikan krisis energi dan akan berdampak pada munculnya krisis sosial dan lingkungan. Bahkan akan memberikan dampak yang lebih serius lagi pada pertanian rakyat untuk memproduksi pangan dan keinginan rakyat untuk mendapatkan kedaulatan pangan.

Dalam 20 tahun terakhir kebijakan neoliberal yang diterapkan secara global telah gagal menjawab kebutuhan dasar dari umat manusia di dunia. FAO pada tahun 1996 melaksanakan KTT Pangan dan PBB mengagendakan Millenium Development Goals untuk mengurangi kelaparan di dunia. Sayangnya makin banyak orang yang justru kelaparan.

Pengembangan agro-fuel banyak dipandangan merupakan langkah untuk menyelamatkan dunia dari perubahan iklim. Sayangnya, pada kenyataan justru hal sebaliknya yang terjadi. Perluasan penanaman perkebunan untuk memproduksi agrofuel telah mengakibatkan peningkatan produksi gas « green house » akibat dari de-forestasi (penggundulan hutan), penggusuran tanah-tanah adat, dan pengeringan tanah rawa-rawa. Dengan perkecualian pada beberapa kasus kecil, bahkan agrofuel tidaklah menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca yang menciptakan perubahan iklim. Semata agrofuel hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar dari sekarang hingga tahun 2020. Jelasnya tidak akan cukup tanah pertanian di seluruh dunia untuk memproduksi agrofuel dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk industri dan transportasi. Pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan energi pada jumlah yang besar melalui agrofuel hanyalah ilusi belaka. Karenannya hanya ada satu jawaban yang sebenarnya tersisa untuk menjawab ancaman perubahan iklim, yaitu kurangi penggunaan energi di dunia dan restrukturisasi model



perdagangan internasional menuju kearah perdagangan atau ekonomi di tingkat lokal.

Sementara itu, pengembangan agrofuel juga berdampak yang sangat buruk secara sosial dan ekologis. Pengembangan agrofuel dengan cara monokultur dan industrial akan mengakibatkan kerusakan pada tanah, persediaan air, dan keanekaragaman hayati. Tidak hanya itu, bahkan berdampak pula pada keluarga petani karena mereka akan terusir dari ladang pertaniannya. Sebuah perkiraan menunjukkan bahwa 5 juta orang petani Indonesia akan terusir dari lahan pertaniannya di Indonesia, 5 juta petani di Brazil, 4 juta petani di Columbia, dan 1 juta petani di Paraguay. Terang sekali bahwa pertanian industrial menciptakan lebih sedikit lapangan kerja di banding dengan pertanian keluarga.

Perluasan penanaman agrofuel juga berdampak pada konsentrasi modal dalam tingkat yang masif pada perusahaan-perusahaan besar dan akan memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan transnational untuk melakukan spekulasi pada harga pangan, tanah pertanian dan lain sebagainya.

Dan pada akhirnya, produksi pangan akan tergantikan oleh

produksi agrofuel. Perluasan agrofuel jelas akan mengakibatkan pengusiran dalam jumlah besar kaum tani dan masyarakat adat dari tanah pertaniannya. Alih-alih penggunaan tanah dan air untuk memproduksi pangan, kekayaan alam tersebut akan dirubah untuk menghasilkan energi dalam bentuk agro-diesel dan ethanol. Sampai dengan hari ini kaum tani, masyarakat adat, pria dan wanita adalah produsen pangan mayoritas di dunia. Bila kita tidak melindungi mereka sekarang ini, maka agrofuel akan mengusir mereka dari tanah pertanian dan pangan akan menjadi langka dan harganya melonjak mahal.

Siapa makan agrofuel?

Kini sebuah bentuk aliansi baru yang terdiri dari pemerintah, perusahaan otomotif, minyak dan agrofuel tengah dibentuk dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan! Mereka memanipulasi ketakutan global mengenai perubahan iklim dan krisis energi, agar produksi agrofuel dapat mereka jalankan model produksi agro industri. Mereka tetap melakukannya meskipun model tersebut merupakan penyebab utama dari perubahan iklim dan

meningkatkan kebutuhan energi secara intensif di dunia.

Perusahaan transnational akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan menguasai pasar pada sektor pangan dan pertanian, dan akan berakibat pada penghilangan pertanian keluarga. Padahal pertanian keluarga adalah model pertanian yang menggunakan benih-benih tradisional, hidup secara berdampingan dengan keanekaragaman hayati, menggunakan energi dari tenaga manusia dan hewan, karenanya dalam memproduksi pangan tingkat konsumsinya jauh lebih kecil, dan pemakaian energi fosilnya pun sangat kecil.

Sebenarnya perusahaan agribisnis mengetahui bahwa menghasilkan agrofuel pada tingkat produksi besar sangat tidak ekonomis. Karenanya agar kompetitif produksi agrofuel dilakukan melalui dengan mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi yang sangat besar, baik langsung ataupun tidak. Dan spekulasi pada sektor keuangan telah mengakibatkan kenaikan harga pangan di dunia.

Gambaran di atas sangat mengkhawatirkan, karena melibatkan jutaan hektar tanah

dan kemiskinan

pertanian dan milyaran Dólar uang. Misalnya, pemerintah India berencana untuk membuka 14 juta Hektar lahan untuk ditanami Jatropha atau pohon jarak, Inter-American Bank of Development mengungkap bahwa Brazil menyiapkan 120 juta hektar lahan untuk agrofuel, dan sebuah kelompok lobi bisnis memperkirakan ada 397 juta hektar lahan di 15 negara di benua Afrika. Bukankah ini akan menjadi pengusiran kaum tani yang sebelumnya tidak pernah terjadi di sejarah pertanian dunia!

Ketika perusahaan transnational dan lembaga-lembaga investasi menuai keuntungan besar, bagian terbesar dari penduduk dunia justru tidak memiliki uang untuk membeli pangan. Krisis pangan yang kini terjadi 30%-nya adalah akibat dari pengembangan agrofuel.

Ketika perusahaan transnational kesulitan mendapatkan tanah pertanian untuk agrofuel, mereka akan melakukan penggundulan hutan/deforestasi pada area-area yang justru sangat diperlukan untuk pertanian lestari dan perlindungan alam.

Terdapat ribuan petani terperangkap pada situasi tanpa alternatif, ikut mengembangkan agrofuel dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. Bagi La Via Campesina, ini bukanlah sebuah bukti bahwa petani diuntungkan oleh agrofuel; tetapi sebuah indikasi yang sangat gamblang bahwa telah dilanggar hak-haknya untuk memproduksi pangan. Mereka terpaksa melakukannya karena tiada pilihan lain. Kebijakan di tingkat internasional dan nasional yang diciptakan oleh lembaga keuangan internasional dan perusahaan transnational bahkan hanya memperdalam tingkat ketergantungan negara berkembang, menciptakan krisis pangan, kemiskinan dan kelaparan yang lebih luas di dunia. Karena itu petani kecil yang terperangkap pada situasi tanpa pilihan, bukanlah pihak yang bersalah; mereka adalah korban dari sistem yang ada yang menimpa mereka!

Buruh tani dan petani kecil menghadapi situasi yang sangat sulit dan mereka kondisi yang membuat mereka tidak bisa menolak atas model pertanian yang menimpa. Karena kebanyakan dari mereka bekerja dalam model pertanian kontrak (contract farming) dengan perusahaan agribisnis yang mengolah, menyuling dan mendistribusikan produk. Karena itulah perusahaan agribisnis tersebut yang menentukan apakah untuk memproduksi pangan atau agrofuel. Lebih dari itu semua, petani kecil tidaklah diuntungkan secara besar pada kenaikan harga saat ini. Harga di tingkat petani tidaklah pada tingkat kenaikan yang sama dengan harga di tingkat konsumen.

Pandangan atas krisis energi: Produksi oleh Petani Kecil & Orientasi untuk Konsumsi Lokal

Pertanian kecil yang berkelanjutan adalah sangat penting dalam memberi pangan dunia. Model pertanian keluarga yang berkelanjutan dan kedaulatan pangan menggunakan hingga 80% energi lebih sedikit dibandingkan dengan pertanian industrial.

Kedaulatan pangan menggunakan kekayaan di tingkat lokal untuk memproduksi pangan, meminimalkan penggunaan bahan baku impor, dan tidak melakukan transportasi pangan antar tempat yang jauh. Karena pangan di produksi dan di konsumsi secara lokal.

Sepanjang sejarah pertanian, petani dan masyarakat desa terbiasa mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari dari lahan pertaniannya. Mereka menggunakan minyak dari kelapa atau bunga matahari, kayu bakar, energi angin dan air melalui mikro hidro untuk mendapatkan energi. Model produksi yang demikian ini adalah berkelanjutan dan dalam siklus yang terintegrasi dengan pertanian pangan.

Sangatlah perlu untuk merancang dan membuat sikap bertanggungjawab pada konsumsi pangan dengan melakukan penyesuaian atas kondisi pangan yang ada saat ini. Harus diakui bahwa model industrial dari produksi dan konsumsi pangan telah mengakibatkan kerusakan pada model produksi pertanian kecil, yang sebenarnya jauh lebih

bertanggungjawab dalam menghasilkan pangan dan energi.

Penyebab krisis

Karenanya La Via Campesina akan terus berjuang melawan kekuatan perusahaan-perusahaan besar dan sistem politik yang mendukung kepentingan mereka. Krisis energi janganlah dilihat sebagai persoalan terpisah, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari krisis model pembangunan yang lebih besar yaitu model yang selalu mendahulukan keuntungan dari pada rakyat.

Karenayalah, kami mendukung model pertanian keluarga yang berkelanjutan, kaya akan diversitas, berorientasi pada pasar lokal, dan menciptakan kehidupan masyarakat desa yang sehat dimana pemakaian energi menjadi berkurang, dan menciptakan tingkat ketergantungan yang lebih kecil. Pertanian keluarga yang berkelanjutan jelasnya sangat cocok dengan tujuan yang sangat fundamental dalam bidang pertanian yaitu memberi pangan rakyat (feed the people).

La Via Campesina menolak :

- : Upaya-upaya tidak bertanggungjawab dalam menghadirkan agrofuel sebagai solusi atas krisis energi dan iklim
- : Skandal dalam produksi agrofuel pada situasi kelaparan di dunia
- : Adanya sikap pasif yang diambil oleh lembaga-lembaga di dunia dalam menghadapi persoalan serius yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan urban, yang justru melakukan agrofuel yang tidak dapat memproduksi pangan dan memberi pangan.
- : Adanya sikap dari lembaga-lembaga tersebut yang menempatkan kepentingan perusahaan transnational di atas atau depan kepentingan rakyat atas pangan.
- : Adanya upaya-upaya untuk mendorong pengembangan agrofuel di tengah adanya fakta bahwa yang terjadi adalah neraca negatif energi dalam produksi, pengolahan dan transportasi.
- : Adanya model neoliberal yang dipromosikan oleh lembaga keuangan internasional. Merekalah yang harus dituntut pertanggungjawabannya atas krisis pangan dan iklim yang kini terjadi.

La Via Campesina menuntut:

- : Penghentian produksi agrofuel yang dilakukan oleh perusahaan dan dikembangkan dengan cara monokultur. Sebagai langkah awal perlu untuk segera dinyatakan adanya moratorium internasional selama 5 tahun pada produksi, perdagangan dan konsumsi atas model agrofuel industrial.
- : Adanya evaluasi yang dalam untuk menghitung dan menganalisis biaya-biaya sosial dan ekonomi yang terjadi akibat dari adanya peningkatan produksi agrofuel dan penciptaan keuntungan oleh perusahaan transnational dalam mengolah dan mendagangkan bahan baku.
- : Adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya atas pengembangan model pertanian berkelanjutan berbasis keluarga dalam produksi dan distribusi pangan; yang sangat minimal dalam penggunaan energi, menciptakan lapangan kerja secara besar, penghargaan atas kebudayaan, dan keanekaragaman hayati termasuk juga dalam mengurangi bahaya pemanasan global (tanah subur sangat baik dalam menangkap CO2)
- : Adanya re-orientasi kebijakan pertanian menuju pengembangan pertanian keluarga yang berkelanjutan dan kehidupan yang berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan dan reforma agraria.
- : Mendorong pengembangan model konsumsi yang bertanggungjawab.

KONFERENSI HAP

Kunjungan tamu asing ke Desa Mandalawangi

Setelah kurang lebih satu minggu melakukan konferensi Internasional Hak Asasi Petani yang berlangsung 21-24 Juni 2008, para delegasi dari 26 negara melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pandeglang, Banten (24/6). Di Pandeglang, delegasi mengunjungi salah satu basis SPI di Desa Mandalawangi, Kecamatan Kade Hejo.

Wilayah Mandalawangi termasuk wilayah subur, secara geografis wilayah ini diapit oleh gunung-gunung. Di Mandalawangi SPI wilayah Banten telah mencanangkan pertanian organik. Walaupun sampai saat ini belum seluruh wilayah desa tersebut pertanian organik.

Di Mandalawangi delegasi disambut petani setempat. Secara simbolik petani memakaikan caping kepada perwakilan delegasi sebagai tanda persahabatan. Pada kesempatan tersebut, turut hadir juga kepala kanwil BPN propinsi Banten dan juga petugas dari Distanak (Dinas Pertanian dan Pertenakan)



Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula pelantikan ketua-ketua Dewan Pengurus Basis SPI dari kecamatan Kaduhejo.

Setelah melakukan dialog singkat antara delegasi, petani dan pemerintahan setempat, rombongan berkeliling untuk melihat kondisi dan praktek

pertanian yang dilakukan oleh petani setempat. Para delegasi juga menyempatkan terlibat langsung "ngagebot" dan nandur padi.

Selain di Mandalawangi, delegasi dibawa ke wilayah Banten Lama. Di sini mereka dikenalkan dengan peradaban banten lama masa lampau dan

sejarah perlawanan rakyat Banten tempo dulu. Banten Lama merupakan situs bekas Kesultanan Banten. Di tempat ini rombongan bisa juga melihat peninggalan sistem irigasi yang pernah diterapkan pada masa Kesultanan Banten.

Sayuran segar dan sehat setiap hari

Pa Tani ORGANIK
pemesanan dan pelayanan
hubungi: 081380166290 (SMS dan telepon)
Kebun organik: Desa Cibeureum Darmaga Bogor